KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Bintang Kejora, DPR Curiga Aparat Takut
Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Soal Bintang Kejora, DPR Curiga Aparat Takut

DPR RI mempertanyakan tindakan TNI/Polri yang tak menindak tegas insiden pengibaran bendera Bintang Kejora di seberang Istana Negara. Wakil rakyat itupun mencurigai aparat takut dalam menegakkan hukum.

"Kita harus dudukkan dulu masalah ini. Kenapa ini bisa bebas itu (pengibaran bendera Bintang Kejora, Red)? Apakah tak ada penegakan hukum? Atau takut dalam menegakkan hukum? Atau memang membiarkan?," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (30/8).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pengibaran bendera Bintang Kejora itu menjadi persoalan tersendiri. Pengibaran bendera Bintang Kejora itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus disikapi serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Pertanyaan bagaimana sikap kita menyikapi Papua ini? Apalagi, di depan Istana Negara, kalau boleh sih nggak ada masalah," kata dia.

Sebab itu, Fadli menyarankan pemerintah segera melakukan kajian serius untuk menyikapi pengibaran bendera bintang kejora itu. "Ini jadi bagian yang harus kita lakukan satu kajian terhadap bendera ini, ya selama itu merupakan aspirasi masyarakat dan dalam kerangka NKRI kenapa tidak," tuturnya.


Victus Murin
GOLKARPEDIA.COM

Terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan terjadinya pengibaran bendera Bintang Kejora oleh demonstran di seberang Istana Presiden Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Soal pengibaran (bintang kejora, Red) itu, kami sangat sesalkan karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI, REd). Kita sebangsa dan setanah air," kata Yasonna di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Yasonna mengimbau demonstran menyudahi aksinya dan sama-sama menahan diri. Sebab, pemerintah telah memberikan perhatian penuh kepada masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sana. Terutama pengusutan perkara rasisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Yasonna menambahkan, pemerintah selalu mengedepankan dialog untuk menghentikan kerusuhan yang masih berlangsung di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat di sana bisa berdialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu.

Ia pun meyakini ada pihak yang menunggangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat sehingga tak kunjung mereda. Yasonna meyakini kerusuhan bakal segera mereda usai para tokoh masyarakat setempat berdialog dengan perwakilan pemerintah.

"Kami serahkan kepada Pak Menko (Bidang Polhukam, Red) serta jajaran yang ditugaskan untuk itu. Tentunya upaya-upaya dialog ini akan terus kami lakukan," imbuh Yasonna.

"Karena tentu ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh dari peristiwa ini. Saya percaya intelijen kita akan dapat mengumpulkan informasi apakah ada orang-orang atau kelompok-kelompok, apakah dari luar atau dalam yang bermain dalam soal ini," tambahnya. (aen)